

KEBIJAKAN SOSIAL PENANGGULANGAN NARKOBA DI SURABAYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Rio Febriannur Rachman

Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang

riofrachman21@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang program penanggulangan narkoba dan obat-obatan berbahaya (narkoba) di Surabaya. Kebijakan sosial ini diimplementasikan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sepanjang tahun 2019. Kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya adalah amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2018 Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019. Ada banyak kegiatan yang telah dilakukan, di antaranya, sosialisasi pencegahan narkoba dan tes urine bagi para pegawai atau petugas di lingkup Pemkot Surabaya dan siswa-siswi sekolah negeri maupun swasta. Tujuan dari program ini adalah mencegah atau mengurangi penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di Surabaya, yang tergolong kota besar di Indonesia, sehingga menjadi salah satu primadona para bandar narkoba. Secara umum, selain diimbau Pemerintah Kota Surabaya, tugas P4GN di Surabaya merupakan tugas kolektif seluruh instansi publik, termasuk kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional Surabaya. Juga tugas segenap elemen masyarakat. Artikel ini membahas tentang bagaimana program penanggulangan narkoba ini dijalankan di masyarakat oleh Pemkot Surabaya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan melihat bagaimana implementasi kebijakan ini dilaksanakan. Pengumpulan data memakai teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan. Teori yang dipakai adalah dasar-dasar kebijakan publik, yang dihubungkan dengan konsep pembangunan sosial berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan konsep kemaslahatan umat yang digariskan ajaran Islam. Hasil dari studi ini menunjukkan, program penanggulangan narkoba Pemkot Surabaya memiliki kesesuaian dengan pembangunan sosial berkelanjutan dan semangat menumbuhkan kemaslahatan umat.

Kata Kunci: *Kebijakan Publik, Narkoba, Kemaslahatan Umat, Pembangunan Sosial Berkelanjutan*

PENDAHULUAN

Pada 28 Agustus 2018 lalu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2018 Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019. Inpres itu berisi perintah pada para menteri, sekretaris kabinet, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, para pemimpin lembaga pemerintah non kementerian, para pemimpin kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, dan para bupati/wali kota. Presiden meminta para pejabat tersebut di atas untuk menjalankan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019.

Ada empat bidang yang menjadi fokus P4GN di Indonesia, pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, serta penelitian & pengembangan penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika¹. Setiap bidang dijalankan oleh segenap elemen pemerintahan dan eksponen masyarakat, secara kolaboratif. Semua pihak mesti saling dukung karena persoalan narkoba yang memiliki kompleksitas tinggi tidak akan bisa diselesaikan oleh satu pendekatan saja².

Bidang pencegahan fokus untuk melakukan peningkatan kampanye publik tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Juga, deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu, pengembangan pendidikan anti narkotika dan prekursor narkotika. Yang tak kalah penting, membangkitkan partisipasi masyarakat untuk peduli pada program ini melalui pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, bidang pemberantasan meliputi pembersihan tempat dan kawasan rawan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Juga, penguatan pengawasan pintu masuk negara republik indonesia (bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara). Selain itu, dilakukan pula pembentukan rumah tahanan narkotika. Yang juga jadi perhatian adalah pengembangan sistem interdiksi terpadu.

Ada pun bidang rehabilitasi berhubungan dengan peningkatan kapasitas layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Juga, peningkatan kapasitas layanan pasca rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Sedangkan bidang penelitian & pengembangan penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor

¹ Bagian Kesra Pemkot Surabaya. *Laporan Pelaksanaan P4GN 2019*. (Surabaya: Bagian Kesra Pemkot Surabaya, tidak diterbitkan)

² Wawancara dengan Kaurbinops Satresnarkoba Polrestabes Surabaya AKP Sherly Mayasari pada 29 November 2019 di Mapolrestabes Surabaya

narkotika berkaitan dengan pengembangan riset permasalahan narkotika dan prekursor narkotika serta integrasi data.

Secara umum, Pemkot Surabaya mengambil peran di semua bidang. Meskipun, sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai pemerintah daerah, konsentrasi utama adalah di bidang pencegahan³. Yang menarik, di aspek rehabilitasi, meski juga terus berkoordinasi dengan jajaran samping, Pemkot Surabaya juga aktif menangani bidang ini. Pasalnya, Pemkot Surabaya memiliki fasilitas yang cukup memadai, dan memunyai tenaga medis maupun psikolog yang berkompeten.

Surabaya tergolong kota besar di Indonesia, baik berdasarkan aspek wilayah ataupun dari aspek jumlah penduduk⁴. Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, penduduk Surabaya mencapai 3.095.026 juta jiwa di tahun 2019. Yang menarik, jumlah penduduk pada siang hari atau pada jam kerja, bisa melonjak hingga lima juta jiwa. Selisih antara angka penduduk malam dan siang hari itu dikarenakan keberadaan mereka yang berdomisili dari kota-kota satelit lain, yang memiliki mata pencaharian di Surabaya. Luas wilayah kota ini tercatat sekitar 326,81 kilometer persegi dan tersusun atas 31 kecamatan. Jumlah penduduk dan perputaran uang yang besar di sebuah kota tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengedar narkoba, di samping menjadi sumber kerentanan wilayah terhadap bahaya barang haram ini⁵.

Tak ayal, kota ini menghadapi kompleksitas sehubungan dengan problem narkoba⁶. Betapa tidak, kota ini memiliki bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, serta jalur-jalur distribusi yang sibuk. Perdagangan barang maupun jasa di kota berjuduk Kota Pahlawan ini bagaikan tak berhenti selama 24 jam sehari. Berangkat dari fakta tadi, Pemkot Surabaya berupaya keras merumuskan inovasi dan strategi supaya masalah narkoba di kota ini dapat dihadapi dengan baik. Utamanya, di bidang pencegahan, pem-

³ Wawancara dengan Kabag Kesra Pemkot Surabaya Imam Siswandi pada 3 Januari 2020 di kantor Bagian Kesra Pemkot Surabaya

⁴ Arief Budiman, Bambang Sulistyantara, and Alinda FM Zain. "Deteksi perubahan ruang terbuka hijau pada 5 kota besar di Pulau Jawa (Studi kasus: DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Jogjakarta, dan Kota Surabaya)" *Jurnal Lanskap Indonesia* 6, no. 1 (2014), 7-15.

⁵ Burhan Arifin. *Narkoba dan Permasalahannya*. (Semarang: PT Bengawalan ilmu, 2007).

⁶ W.A.S.I. Wisnu Setyawan Adyka Putra. "Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya." *Jurnal Novum* 2, no. 2 (2017).

berdayaan masyarakat, serta rehabilitasi para eks pengguna narkoba maupun eks pengedar barang haram tersebut.

Program-program yang dilaksanakan di lingkup pencegahan antara lain, sosialisasi tentang bahaya menyalahgunakan narkoba, pelatihan seputar kepemimpinan yang berorientasi pada kegiatan antinarkoba, pencetakan tim untuk deteksi dini maupun kader yang punya semangat antinarkoba, dan lain sebagainya⁷. Sementara itu, program-program di lingkup pemberdayaan masyarakat di antaranya, mengikutsertakan warga dalam upaya pengawasan lingkungan agar di kawasan masing-masing tidak ada peredaran narkoba⁸.

Tim Pemkot Surabaya juga melakukan sosialisasi jenis-jenis narkoba agar warga lebih waspada dan sigap melaporkan kondisi mencurigakan pada kepolisian. Tim Pemkot Surabaya juga berusaha menciptakan lingkungan yang sehat melalui kegiatan-kegiatan positif. Di antaranya, dengan mengelat Lomba Kampunge Arek Suroboyo, di mana kampung bebas narkoba menjadi salah satu parameter penilaian.

Di lingkup rehabilitasi terdapat program memberikan konseling para eks pengguna narkoba supaya mereka tidak mengonsumsinya lagi. Juga, pelatihan kerja bagi mantan pemakai narkoba yang putus sekolah, ataupun bagi mantan tersangka kasus narkoba. Melalui cara ini, kekuatan mental dan rasa percaya diri akan kembali tumbuh⁹.

Pada tahun 2019, Wali Kota Tri Rismaharini menerbitkan Keputusan Walikota nomor 188.45/248/436.1.2/2019 untuk membentuk Tim Terpadu P4GN, baik di tingkat Kota Surabaya maupun di tiap Kecamatan di Surabaya. Tujuan, visi dan misi tim ini secara umum adalah meralisasikan Kota Surabaya yang bebas narkoba.

Di tim tingkat kota, Kepala Bagian Kesra menjadi Wakil Sekretaris. Oleh sebab itu, instansi ini melakukan banyak kegiatan. Tak kurang dari enam belas sosialisasi dan tes urine dilaksanakan oleh Bagian Kesra Pemkot Surabaya. Dalam pelaksanaannya, dilakukan sinergi dengan perangkat daerah lain di internal Pemkot Surabaya. Juga, kolaborasi dengan jajaran samping.

⁷ Nuri Pina & Oedojo Soedirham. "Dukungan Pemerintah dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surabaya." *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* 3, no. 2 (2015): 171-182.

⁸ Devyi Mulia Sari. "Peran Kader Anti Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Pelajar oleh Badan Narkotika Nasional Surabaya." *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* 5, no. 2 (2018), 128-140.

⁹ Bagian Kesra Pemkot Surabaya. *Laporan Pelaksanaan P4GN 2019*. (Surabaya: Bagian Kesra Pemkot Surabaya, tidak diterbitkan)

Artikel ini mendiskusikan bagaimana kebijakan sosial penanggulangan narkoba ini diimplementasikan di Surabaya secara komprehensif. Teori dan konsep kebijakan publik dijadikan acuan dasar dari riset ini. Konteksnya, kebijakan publik merupakan tatanan terstruktur yang dapat berbentuk sebuah regulasi, sistem maupun mekanisme program kegiatan tertentu. Dilaksanakan oleh pemerintah dengan semua sumber daya yang bisa dikelola, dan seluruh potensi, demi memberikan kebermanfaatan kongkret di masyarakat¹. Kajian kali ini dihubungkan dengan konsep tujuan pembangunan sosial berkelanjutan PBB dan nilai-nilai kemaslahatan umat yang diajarkan dalam agama Islam.

METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kualitatif adalah metode yang memiliki prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, bertolak dari pengamatan terhadap fenomena sosial¹, termasuk bagaimana implementasi kebijakan sosial yang dijalankan oleh pemerintah. Dalam hal ini, kegiatan penanggulangan narkoba dijalankan oleh Bagian Kesra Pemkot Surabaya.

Lokasi penelitian dilakukan di Surabaya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan stui pustaka/dokumentasi. Data dianalisis melalui tiga tahapan, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, agar eksplorasi dapat menghasilkan temuan yang komprehensif berhasil dipaparkan¹.

PEMBAHASAN

Secara umum, seluruh perangkat daerah di internal Pemkot Surabaya aktif melakukan gerakan P4GN. Sementara itu, Bagian Kesra melaksanakan enam belas kegiatan di tahun 2019 ini. Mayoritas dilaksanakan di lingkungan sekolah. Dilakukan pula di di markas Satpol PP, Bakesbang Linmas, dan di Balai Pemuda Surabaya. Yang terakhir ini, diikuti oleh Satgas Pekerjaan Umum Pemkot Surabaya. Artinya, semua petugas lapangan di lingkungan Pemkot Surabaya, diberi pembekalan tentang kewaspadaan pada narkoba.

¹ James E. Anderson. *Public Policy Making*. (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984).

¹ Robert Bogdan & Steven J. Taylor. *Introduction to Qualitative Research Methods 3rd Edition*. (New Jersey: Wiley, 1998)

¹ Sugiyono. *Metode Penelitian²Kombinasi*. (Bandung: Alfabeta, 2012).

Dalam tiap kegiatan Bagian Kesra, diajak pula untuk berpartisipasi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A), dan Bakesbangpol Linmas serta kepolisian¹. Pihak-pihak tersebut³ memiliki peran masing-masing. Dinas Kesehatan menyiapkan pengetes urine/alat reagen. Tentu saja bersama petugas pengetes yang sudah profesional dan seorang narasumber di bidang kesehatan. Pada 16 pelaksanaan yang digelar di tahun ini, diadakan setidaknya 1.628 tes. Sementara itu, Dinas Pendidikan mengondisikan lokasi yang bertempat di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta.

DP5A memberikan pembinaan psikologis, termasuk menjadi narasumber seputar efek negatif narkoba. Bakesbangpol Linmas mengoordinasikan dan menjaga keamanan serta ketertiban di lokasi kegiatan. Perwakilan Polrestabes terlibat sebagai narasumber. Apabila ditemukan peserta sosialisasi yang urinenya terdeteksi zat obat-obatan, dia akan di-assement petugas DP5A. Karena tidak menutup kemungkinan, zat obat tersebut bukan berasal dari narkoba dan sejenisnya. Maka itu, wawancara yang mendalam tetap diperlukan¹.

4

Kegiatan yang dimaksud antara lain dilaksanakan di SMP Kawung 2 (19 Maret), SMPN Tanwir (21 Maret), Balai Pemuda (29 April), markas Bakesbangpol Linmas (28 Juni), kantor Satpol PP (19, 23, 26, 30 Juli), SMPN 52 (20 Agustus), SMPN 57 (27 Agustus), SMP GIKI 2 (28 Agustus), SMPN 58 (24 September), SMPN 45 (25 September), SMPN 7, (27 September), SMPN 53 (9 Desember), dan SMPN 17 (10 Desember).

Berbasis *Maqasid Syariah*

Para pakar menjelaskan tentang konsep kebijakan publik sebagai apapun yang dijalankan atau tidak dijalankan oleh pemerintah dan itu berhubungan dengan hajat hidup masyarakat¹. Siapa yang melaksanakannya⁵? Tentu saja, pemerintah beserta perangkat-perangkatnya, baik yang di lev-

¹ Wawancara dengan Kabag Kesra Pemkot Surabaya Imam Siswandi pada 3 Januari 2020 di kantor Bagian Kesra Pemkot Surabaya

¹ Bagian Kesra Pemkot Surabaya. *Laporan Pelaksanaan P4GN 2019*. (Surabaya: Bagian Kesra Pemkot Surabaya, tidak diterbitkan)

¹ Thomas R. Dye. *Understanding Public Policy*. (New Jersey: Prentice Hall, 1972).

el bawah maupun di level atas¹. Tujuan implementasi kebijakan publik adalah menebarkan manfaat pada semua lapisan masyarakat. Di Surabaya, ada banyak kebijakan yang sudah dijalankan dan terbukti memberi manfaat pada warga di banyak bidang. Umpamanya, di bidang teknologi komunikasi yang dikembangkan bagi kesejahteraan tenaga sosial kecamatan¹. Juga, konseling serta pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus¹.

7

8

Ada pun kebijakan penanggulangan narkoba oleh Bagian Kesra Pemkot Surabaya berfokus pada pencegahan bahaya narkoba di masyarakat. Khususnya, pada anak-anak sekolah dan petugas lapangan di lingkup Pemkot Surabaya. Terdapat sejumlah harapan dari berlangsungnya program-program penanggulan narkoba yang digagas Bagian Kesra Pemkot Surabaya ini. Di antaranya, memberikan edukasi tentang bahaya narkoba pada siswa sekolah dan petugas lapangan Pemkot Surabaya. Dengan demikian, mereka yang menjadi sasaran program ini sedini mungkin bisa menjauhkan diri dari narkoba.

Bila mengacu pada apa yang disampaikan Bromley dalam Tachjan¹, ada tiga level struktural dari kebijakan publik, yakni, *policy level*, *organizational level*, dan *operational level*. Di Indonesia, *policy level* diperankan oleh pihak yudikatif dan legislatif. Sementara *organizational level* dijalankan oleh pihak eksekutif. Ada pun *operational level* dilaksanakan oleh perangkat-perangkat di tubuh eksekutif. Kebijakan penanggulangan narkoba yang dibahas dalam artikel ini peran *policy level* dipegang pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya. Sementara *organizational level* diperankan oleh Pemkot Surabaya. Sedangkan *operational level* dijalankan Bagian Kesra Pemkot Surabaya. Semua kebijakan yang dilakukan tentu memiliki dasar regulasi mengikat atau *institutional arrangement*.

Program ini diinisiasi oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Dalam pelaksanaannya, Wali Kota Surabaya tidak sekadar berposisi sebagai ini-

¹ James E. Anderson. *Public Policy Making*. (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984)

¹ Rio Febriannur Rachman. "Optimalisasi Teknologi Komunikasi Informasi Command Center Bagi Efektifitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan". *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 5, No. 2 (2019), 72-81

¹ Rio Febriannur Rachman. "Kebijakan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Di Surabaya Dalam Perspektif Islam." *Bidayatuna: Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah* 3, No. 1 (2020), 125-143.

¹ Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. (Bandung: AIPI, 2006).

siator program. Tak sampai di situ, Wali Kota juga terus melihat progress dari program ini. Di samping itu, ada evaluasi berjenjang yang dilakukan oleh Kabag Kesra pada petugas lapangan, lantas Kabeg Kesra membuat laporan untuk disampaikan pada Wali Kota.

Persoalan narkoba merupakan salah satu atensi utama Wali Kota Tri Rismaharini. Dalam banyak kesempatan, dia memberikan pemahaman pada segenap warga agar waspada pada bahaya narkoba. Misalnya, tampak pada 12 Maret 2019, di Convention Hall Jalan Arief Rahman Hakim. Sedikitnya ada dari 1.800 siswa dari 50 lembaga SMP di bawah naungan Yayasan Nahdlatul Ulama (NU) se-Kota Surabaya yang mendapat pembinaan karakter dan motivasi belajar langsung darinya². Dalam sesi tersebut, Wali Kota menyisipkan pesan-pesan tentang pentingnya menghindari narkoba. Narkoba merusak otak dan membuat ketagihan.

Demikian pula pada acara Mlaku-mlaku Nang Tunjungan 1 Desember 2019, saat pemberian penghargaan bagi Kampung Pendidikan Kampung'e Arek Suroboyo (KPKAS) 2019. Dalam kesempatan itu, Wali Kota minta semua pihak, khususnya para orang tua, guna bersama-sama menjaga para anak muda dari keganasan narkoba². Kebijakan sosial penanggulangan narkoba ini juga bertolak dari semangat kebersamaan, dan kekeluargaan. Tujuannya, menjadikan Surabaya nyaman bagi seluruh warganya. Oleh karena itu, respon positif dari masyarakat, misalnya berupa kritik dan masukan konstruktif, selalu diharapkan. Sehingga, semua program yang disusun dapat terus menjadi lebih baik.

Para pemikir Islam klasik maupun kontemporer mencetuskan konsep *maqâsid al-syari'ah*, yang membahas posisi agama sebagai ajaran yang memberi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta². Konsep tersebut berhubungan pula dengan pendidikan yang humanis². Yang dalam

² Humas Pemkot Surabaya. "Wali Kota Risma Beri Penguatan Karakter Kepada 1800 Siswa SMP", 2019, <https://humas.surabaya.go.id/2019/03/13/wali-kota-risma-beri-penguatan-karakter-kepada-1-800-siswa-smp/> (4 Januari 2020)

² Hilda Meilisa. "Beri Awarding, Risma ingin Kampung di Surabaya Dukung Kesuksesan Anak", 2019, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4805533/beri-awarding-risma-ingin-kampung-di-surabaya-dukung-kesuksesan-anak> (4 Januari 2020)

² Abu Ishaq Al-Syathibi. *Al-Mu'wafaqat fi Ushul Al-Syari'at*. (Beirut-Lebanon: Dar Al-Ma'arif, tanpa tahun)

² Wasehudin, W., "Menggaga³ Nilai-Nilai Pendidikan Humanis Dalam Maqasid Al-Syari'ah". *Tazkiya*, 19, No. 2 (2018), 68-79.

program ini, esensinya adalah edukasi tentang narkoba. Jadi, pendidikan atau edukasi soal narkoba ini juga merupakan bentuk religiositas serta implementasi hubungan spiritual manusia dengan Tuhan Yang Mahaesa.

Bila diperhatikan, program ini melindungi jiwa dan akal warga yang menjadi sasaran, dalam hal ini peserta sosialisasi dan tes urin, karena di dalamnya terdapat asupan motivasi. Jiwa dan akal berkaitan dengan aspek psikologis manusia. Terlebih, dalam semua motivasi yang diberikan narasumber juga ada nilai-nilai religiositas yang ditanamkan. Artinya, program ini turut menjadi sarana tumbuhnya keyakinan pada kasih sayang Tuhan Yang Mahaesa. Di sini bisa dimaknai pula bila program penanggulangan narkoba punya kesesuaian dengan semangat perlindungan pada agama seseorang.

Bagaimana dengan konsep perlindungan keturunan dan harta? Apabila seseorang tidak terjerat pada narkoba, anak dan istrinya pasti akan lebih berbahagia. Sebaliknya, mereka yang terjebak dalam narkoba, anak dan istrinya dalam kesusahan. Sedangkan para pecandu narkoba, pasti bakal hancur ekonominya². Dalam perspektif semacam ini, program penanggulangan narkoba punya andil dalam perlindungan keturunan dan harta seseorang.

Bersehat Kemaslahatan Umat

Di tahun 2015, PBB merumuskan sejumlah tujuh belas aspek tujuan pembangunan sosial berkelanjutan². Harapannya, seluruh pemerintah di dunia, dalam level apapun, menyepakati nilai-nilai dalam semua aspek saat menetapkan kebijakan. Sebab, tujuh belas aspek tersebut memiliki citac-ita mewujudkan masyarakat yang lebih berkualitas di masa depan.

Tentu saja, bukan berarti satu kebijakan atau program wajib memuat tujuh belas aspek sekaligus. Namun paling tidak, tiap kebijakan memuat setidaknya satu aspek yang dimaksud. Semakin banyak aspek yang termuat, pasti semakin bagus.

Tujuh belas butir aspek tersebut adalah, pertama, *No Poverty* atau mengurangi angka kemiskinan. Kedua, *Zero Hunger* atau menghilangkan kelaparan. Ketiga, *Good Health and Well-Being* atau menciptakan kehidupan yang

² Wawancara dengan Kaurbinops Satresnarkoba Polrestabes Surabaya AKP Sherly Mayasari pada 29 November 2019 di Mapolrestabes Surabaya

² Perserikatan Bangsa-Bangsa⁵ "About the Sustainable Development Goals". 2015, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>. (11 September 2018)

sehat dan sejahtera bagi masyarakat. Keempat, *Quality Education* atau merealisasikan pendidikan berkualitas di masyarakat. Kelima, *Gender Equality* atau adanya kesetaraan gender. Keenam, *Clean Water and Sanitation* atau penjaminan air dan sanitasi yang bersih. Ketujuh, *Affordable and Clean Energy* atau memudahkan akses pada energi yang ramah lingkungan.

Kedelapan, *Decent Work and Economic Growth* atau penjaminan terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Kesembilan, *Industry, Innovation and Infrastructure* atau berkembangnya industri berbasis inovasi demi pemeratakan infrastruktur. Kesepuluh, *Reduced Inequalities* atau adanya semangat mereduksi ketidaksetaraan. Kesebelas, *Sustainable Cities and Communities* atau adanya upaya menjaga keberlanjutan kota dan komunitas yang baik.

Kedua belas, *Responsible Consumption and Production* atau pola konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab. Ketiga belas *Climate Action* atau peduli pada isu perubahan iklim. Keempat belas, *Life Below Water* atau peduli pada kehidupan dan kelangsungan di perairan, hewan dan tumbuhan di sana. Kelima belas *Life on Land* atau peduli pada kehidupan dan kelangsungan di daratan. Keenam belas, *Peace, Justice, and Strong Institutions* atau terbentuknya institusi pemerintah yang damai dan berkeadilan. Ketujuh belas, *Partnership for The Goals* atau terjalinnya kemitraan baik antar institusi dalam satu negara, maupun antar institusi global.

Program penanggulangan narkoba ini senada dengan cita-cita *Good Health and Well-Being* atau keterjaminan kesehatan dan hidup yang baik. Dengan terbebasnya masyarakat dari narkoba, jasmani akan lebih sehat dan kehidupan akan menjadi berkualitas atau sejahtera. Program ini juga berupaya agar kesehatan dan kehidupan masyarakat terus terpantau. Baik yang sifatnya jasmani, maupun ruhani yang berhubungan dengan mental.

Keberadaan program ini juga selaras dengan aspek *Quality Education*. Fokusnya, edukasi bermutu tentang bahaya narkoba. Apalagi, problem narkoba ini bukan hal yang sepele dan punya efek menghancurkan apabila tidak dikelola dengan baik. Sudah barang tentu pula, program ini selaras dengan semangat *Sustainable Cities and Communities* atau keinginan menjaga keberlanjutan kota dan komunitas yang baik. Bayangkan jika masyarakat menganggap narkoba sebagai barang yang biasa-biasa saja, sehingga warga punya kebiasaan mengonsumsi barang laknat ini. Pasti komunitas maupun kehidupan kota bakal tercemar.

Yang tak kalah menarik, Bagian Kesra tidak menjalankan program ini sendirian. Perangkat daerah ini bersinergi dengan perangkat daerah lainnya di internal Pemkot Surabaya. Juga, bersinergi dengan pihak lain di eksternal Pemkot Surabaya. Pastinya pula, sinergi dengan DPRD Surabaya sebagai pengawas program.

Bagaimana pun juga, program ini terselenggara atas dana APBD Surabaya atau uang rakyat, sehingga harus disetujui DPRD Surabaya. Otomatis, para wakil rakyat memantau dan memberi masukan untuk program ini. Ekspresan masyarakat yang juga punya andil adalah pers sebagai kontrol sosial.

Pelaksanaan program yang dilakukan dengan semangat kebersamaan ini senada dengan makna persatuan dalam perjuangan yang terdapat pada sejumlah ayat di Al-Qur'an. Misalnya, di Surat Ash-shof ayat keempat: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berjuang di Jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Konsep berjuang yang terdapat di ayat ini bisa dimaknai tidak sebatas tentang barisan perang atau angkatan bersenjata. Lebih luas lagi, perjuangan di sana bisa dimaknai sebagai seluruh upaya guna merealisasikan kemaslahatan umat dan memberikan manfaat kehidupan manusia seluas-luasnya. Selaras juga dengan salah satu riwayat yang menyatakan: Wajib atas kaum muslimin bersama dalam Al-Jamaah dan berhati-hati pada perpecahan (HR At-Tirmidzi). Dalam konteks kekinian, Al-Jamaah bisa pula diasumsikan sebagai gerakan yang memiliki harapan mewujudkan kemaslahatan umat. Di sisi lain, kebijakan yang mengandalkan sinergitas ini memang sudah menjadi ciri khas Pemkot Surabaya. Ada banyak program yang dilakukan dengan modal kebersamaan seperti ini, umpamanya, di bidang pemberdayaan industri kreatif dan pemaksimalan potensi media digital untuk berwirausaha di Koridor Jalan Tunjungan² .

6

Bagian Kesra sendiri meyakini, tantangan penanggulangan narkoba tiap waktu makin besar. Oleh sebab itu, patut dirumuskan rencana terukur dan terstruktur yang lebih detail² . Sehingga, program ini lebih tepat sasaran dan bermanfaat secara lebih luas. Bagian Kesra terus melakukan koordinasi

² Rio Febriannur Rachman. "Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Media Digital di Surabaya dalam Perspektif Islam". *Komunitas 10*, No. 2 (2019), 157-176.

² Wawancara dengan Kabag Kesra Pemkot Surabaya Imam Siswandi pada 3 Januari 2020 di kantor Bagian Kesra Pemkot Surabaya

dan komunikasi dengan Bakesbangpol Linmas, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, DP5A, Dinas Sosial, serta dinas-dinas lain. Termasuk, Dinas Tenaga Kerja yang kerap mengadakan pelatihan kerja, dan salah satu kelompok sasarannya adalah mantan pemakai narkoba.

Rencananya, akan dilaksanakan agenda forum rutin di internal Pemkot Surabaya, satu atau dua bulan sekali, untuk mendiskusikan kegiatan-kegiatan spesifik yang akan dilakukan kemudian. Karena, dinamika kawasan Surabaya tidak pernah bisa ditebak. Sehingga, para pemangku kepentingan pun mesti cikap dan sigap dengan segala perubahan.

Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus membahas pencegahan dan rehabilitasi narkoba di Surabaya diharapkan bisa disahkan pada tahun 2020 ini. Keberadaan Perda akan memperkuat kerja yang sudah dilakukan selama ini. Peta kawasan sosialisasi dan kegiatan sudah dipersiapkan. Dipastikan, akan ada perluasan jangkauan sasaran agar kampanye antinarkoba menyentuh tiap sudut wilayah Surabaya.

KESIMPULAN

Sejumlah pakar menyebutkan, kesuksesan implementasi kebijakan publik yang dilakukan pemerintah dapat ditelaah melalui tiga elemen². Pertama, terdapat keberlanjutan kepatuhan (*compliance*) dari objek yang berhubungan dengan implementasi kebijakan ini. Yang kedua, adanya konsistensi kegiatan dengan jumlah komplain yang sedikit, bahkan sebaiknya tanpa komplain. Dalam konteks ini, mesti dibedakan antara kritik/masukan dengan komplain. Ketiga, semua program kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dan transparansinya terjamin. Tidak ada elemen yang ditutup-tutupi, sejak tahap perencanaan hingga implementasi. Yang tak kalah penting, adanya kepuasan dari penerima manfaat dari program kebiagatan yang dihasilkan oleh kebijakan ini.

Berdasarkan pada perspektif tersebut, kebijakan sosial penanggulangan narkoba di Surabaya yang dijalankan oleh Bagian Kesar Pemkot Surabaya dapat dikatakan berjalan dengan lancar. Terdapat fakta yang dapat memperkuat persepsi tersebut. Pertama, kepatuhan dari masyarakat yang menerima manfaat dari kebijakan ini telah terwujud. Baik pihak sekolah negeri dan swasta serta petugas/pegawai Pemkot yang menjadi sasaran tidak

² Randall B. Ripley & Grace A. Franklin. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: The Dorsey Press, 1986).

membunyikan keluhan. Di lain pihak, pelaksana lapangan pun tidak mengalami kendala berarti dalam menjalankan program ini. Kedua, konsistensi program sepanjang tahun 2019 sudah terealisasi dengan jumlah complain yang nihil.

Bagian Kesra Pemkot Surabaya serius menjalankan program yang sudah ditetapkan pada akhir tahun 2018 ini, tatkala ada rapat pembahasan pula bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya. Bahkan, DPRD menyebutkan kalau kegiatan semacam ini perlu terus dilaksanakan dan volumenya mesti ditambah dari tahun ke tahun². Mengingat, jumlah penduduk Surabaya dan luasan kawasan di kota ini yang besar. Bagian Kesra Pemkot Surabaya juga berupaya untuk menggulirkan kegiatan serupa pada tahun 2020 dan tahun-tahun yang akan datang. Tentu saja, dengan sejumlah pembenahan yang bertolak dari saran-saran konstruktif berbagai pihak.

Ketiga, kebijakan sosial penanggulangan narkoba di Surabaya ini bisa dipertanggungjawabkan dan telah dipertanggungjawabkan dalam rapat APBD 2019. Pada tahun 2020 dan yang akan datang, program serupa juga bakal terus dilaksanakan. Karena memberantas narkoba merupakan salah satu komitmen Pemkot Surabaya. Terlebih, kebijakan ini selaras pula dengan tujuan pembangunan sosial berkelanjutan PBB dan sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan umat dalam ajaran Islam.

Kebijakan ini terjamin konsistensinya karena Surabaya memiliki modal keuangan atau kekuatan APBD yang menyukupi untuk operasionalnya. Di samping itu, modal sosial budaya sebagai masyarakat yang guyub dan suka bergotong royong menjadi poin yang secara tidak langsung mendukung keberlangsungan kebijakan ini. Apabila masyarakat di kota ini individualis, program yang berhubungan dengan persoalan individu, misalnya para korban narkoba, tidak akan didukung warga sehingga akan mengalami kegagalan di tengah jalan.

Daftar Pustaka

Al-Syathibi, Abu Ishaq. Tanpa Tahun. *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'at*, Beirut-Lebanon: Dar Al-Ma'arifat

² Pernyataan Anggota DPRD Surabaya dari Partai Amanat Nasional Juliana Eva Wati pada November 2019 dalam rapat pembahasan program di kantor Bagian Kesra Pemkot Surabaya

- Anderson, James E. 1984. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Arifin, Burhan. 2007. *Narkoba dan Permasalahannya*. Semarang: PT Bengawan ilmu.
- Budiman, Arie, Bambang Sulistyantara, and Alinda FM Zain. "Deteksi perubahan ruang terbuka hijau pada 5 kota besar di Pulau Jawa (Studi kasus: DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Jogjakarta, dan Kota Surabaya)." *Jurnal Lanskap Indonesia* 6, no. 1 (2014).
- Dye, Thomas R. 1972. *Understanding Public Policy*. New Jersey : Prentice Hall.
- Meilisan, Hilda. "Beri Awarding, Risma ingin Kampung di Surabaya Dukung Kesuksesan Anak". 2019. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4805533/beri-awarding-risma-ingin-kampung-di-surabaya-dukung-kesuksesan-anak> (4 Januari 2020)
- Pemkot Surabaya, Bagian Kesra. *Laporan Pelaksanaan P4GN 2019*. Surabaya: Bagian Kesra Pemkot Surabaya, tidak diterbitkan.
- Pemkot Surabaya, Humas. "Wali Kota Risma Beri Penguatan Karakter Kepada 1800 Siswa SMP". 2019. <https://humas.surabaya.go.id/2019/03/13/wali-kota-risma-beri-penguatan-karakter-kepada-1-800-siswa-smp/> (4 Januari 2020)
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. "About the Sustainable Development Goals", 2015 <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/> (11 September 2018)
- Pina, Nuri & Oedojo Soedirham. "Dukungan Pemerintah dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surabaya." *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* 3, no. 2 (2015).
- Rachman, Rio Febriannur. "Kebijakan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Di Surabaya Dalam Perspektif Islam." *Bidayatuna: Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah* 3, No. 1 (2020).
- Rachman, Rio Febriannur. "Optimalisasi Teknologi Komunikasi Informasi Command Center Bagi Efektifitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan". *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 5, No.2 (2019).
- Rachman, Rio Febriannur. "Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Media Digital di Surabaya dalam Perspektif Islam". *Komunitas* 10, No. 2 (2019).

- Ripley, Randall B. & Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: The Dorsey Press.
- Robert Bogdan & Steven J. Taylor. 1998. *Introduction to Qualitative Research Methods 3rd Edition*. New Jersey: Wiley
- Sari, Devyi Mulia. "Peran Kader Anti Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Pelajar oleh Badan Narkotika Nasional Surabaya." *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* 5, no. 2 (2018).
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- W.A.S.I. Wisnu Setyawan Adyka Putra. "Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya." *Jurnal Novum* 2, no. 2 (2017).
- Waschudin, W., "Menggagas Nilai-Nilai Pendidikan Humanis Dalam Maqasid Al-Syari'ah". *Tazkiya* 19, No. 2 (2018).